

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korea Selatan adalah salah satu negara *Asia-Arctic Five* atau AA5 bersama dengan China, India, Jepang dan Singapura yang memperoleh status sebagai permanen *observer* di *Arctic Council* pada tahun 2013 di Kiruna, Swedia.<sup>1</sup> Sebelum resmi menjadi permanen *observer* di *Arctic Council*, Korea Selatan telah berperan sebagai *ad hoc observer* di *Arctic Council* sejak tahun 2008 bersama Uni Eropa, China, Italia, dan Jepang.<sup>2</sup> Keterlibatan Korea Selatan di wilayah Arktik meningkat setelah berdirinya *Arctic Council* pada tahun 1996 dan memulai aktivitas Arktiknya dengan melakukan penelitian ilmiah bersama dengan China sebagai langkah awal dalam membangun kehadiran di wilayah dingin tersebut. Pada tahun 2002, Korea Selatan mendirikan *Arctic Daseon Station* di Ny-Ålesund, Kepulauan Svalbard, Norwegia untuk melakukan penelitian independen di Arktik dan bergabung dengan Perjanjian Svalbard pada tahun 2012. Keterlibatan Korea Selatan di Arktik melalui kegiatan penelitian ilmiah merupakan bentuk respon negara terhadap perubahan yang terjadi di Arktik. Mencairnya lapisan es di permukaan laut karena temperatur yang menghangat memunculkan signifikansi strategis Arktik bagi Korea Selatan mengenai peluang pengembangan wilayah Arktik.

---

<sup>1</sup> Over the Circle. (2018, February 10). *South korea's arctic journey*. Diambil kembali dari <https://overthecircle.com/2018/02/10/south-koreas-arctic-journeys/>

<sup>2</sup> Hyon-hee, S. (2013, Maret 18). *Korea pitches for arctic council membership*. Diambil kembali dari <https://m.koreaherald.com/amp/view.php?ud=20130318000933>

Perubahan Arktik yang secara dramatis yang ditandai dengan mencairnya lapisan es Arktik di bulan-bulan musim panas diperkirakan membuka kemungkinan bagi lebih banyak eksplorasi minyak, gas, dan mineral.<sup>3</sup> Arktik dipercayai memiliki 30% gas alam yang belum ditemukan dan 13% minyak yang belum ditemukan.<sup>4</sup> Menurut penilaian dari *United States Geological Survey* (USGS) pada tahun 2008, Arktik diperkirakan dapat menyimpan 90 juta barel minyak bumi, 1,669 triliun kaki kubik gas alam dan 44 juta barel *liquefied natural gas* (LNG).<sup>5</sup> Pertimbangan atas melimpahnya sumber daya alam di Arktik,<sup>6</sup> yang mendorong meningkatnya minat industri ekstraktif dan juga negara-negara non-Arktik termasuk Korea Selatan untuk semakin terlibat di wilayah Arktik.

---

<sup>3</sup> Groc, I. (2017). *A Changing Arctic*. Diambil kembali dari <https://www.worldwildlife.org/magazine/articles/a-changing-arctic>

<sup>4</sup> *Arctic Oil and Natural Gas Resources*. (2012, Januari 20). Diambil kembali dari <https://www.iea.gov/todayinenergy/detail.php?id=4650>

<sup>5</sup> Bird, K. J., Ronald R. Charpentier, Gautier., D. L., David W. Houseknecht, Timothy R. Klett, Janet K. Pitman, . . . Craig R. Wandrey. (2008). *Circum-Arctic resource appraisal: Estimates of undiscovered oil and gas north of the Arctic Circle*. Diambil kembali dari [pubs.usgs.gov: https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/](https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/)

<sup>6</sup> Karakteristik Arktik yang dikelilingi oleh negara berdaulat menjadikan segala kegiatan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan Arktik harus dilakukan sesuai dengan perjanjian internasional seperti UNCLOS dan *Svalbard Treaty*. Ini karena meski Arktik tidak dilindungi oleh rezim hukum yang mengikat dan tetap menjadi wilayah yang tidak dikontrol oleh satu perjanjian internasional, Arktik adalah lautan atau sekumpulan lautan es yang sebagian besar diatur oleh hukum laut (lihat pada Lennon, E. (2008). *A Tale of Two Poles: A Comparative Look At The Legal Regimes in The Arctic and The Antarctic*. *Environmental Change in Polar* , 32-36.; Pérez, E. C., & Marzia Scopelliti. (2018, April 27). *Arctic Region*. Diambil kembali dari <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0090.xml>

Selain itu, dampak dari perubahan iklim global yang mempercepat pembukaan perairan Arktik Biru telah memunculkan harapan akan terciptanya akses yang lain melalui jalur navigasi yang sebelumnya tertutup es.<sup>7</sup> Jalur tersebut akan memangkas jarak pelayaran dari Atlantik ke Pasifik, dari Eropa Utara ke Amerika Utara dan Asia Timur melalui jalur laut yang lebih pendek melalui *Northwest Passage* dan *Northeast Passage* yang termasuk *Northern Sea Route* (NSR). Di samping itu, akibat dari perubahan iklim di Arktik juga menjadikan wilayah Arktik saat ini sering digambarkan sebagai area penting dari kepentingan dan dispekulasikan memicu pertikaian geopolitik yang melibatkan lima negara anggota tetap *Arctic Council* tidak termasuk Finlandia, Swedia, dan Islandia dalam berebut Arktik (*scramble for the Arctic*),<sup>8</sup> terkait klaim tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang melebihi 200 mil laut dan perluasan 350 mil laut Zona Landas Kontinen (ZLK) untuk mengamankan potensi ekonomi strategis yang mencakup prospek terbukanya jalur alternatif dan cadangan energi tambahan di area lapisan es yang mencair.<sup>9</sup>

Kelima negara ini merupakan negara pesisir Samudera Arktik yang memiliki kedaulatan dan yurisdiksi di zona maritim yang meluas ke Samudera Arktik dan disebut sebagai *Arctic Five/ A5*, terdiri dari Amerika Serikat (Alaska), Kanada,

---

<sup>7</sup> Groc, I. (2017). *A Changing Arctic*. Diambil kembali dari <https://www.worldwildlife.org/magazine/articles/a-changing-arctic>

<sup>8</sup> Dodds, K., & Nuttall, M. (2016). *The Scramble for the Poles: The Geopolitics of the Arctic and Antarctic*. Cambridge: Polity Press.

<sup>9</sup> Gautam, P. (2011). The Arctic as a Global Common. *IDSIA Issue Brief*, 1-10.

Rusia, Norwegia, dan Denmark (Greenland).<sup>10</sup> Karena itu, wilayah Arktik terdiri atas tiga bagian: 1) wilayah daratan negara Arktik; 2) zona maritim negara pesisir Arktik; 3) laut lepas Samudera Arktik tengah yang mengelilingi Kutub Utara.<sup>11</sup> Namun, terlepas dari prediksi tentang meningkatnya ketegangan di Arktik karena dua peristiwa geopolitik yang memengaruhi tindakan *pre-emptive* setiap negara pesisir Arktik dalam menyikapi perubahan Arktik dan persaingan kepentingan yang mengikuti di kawasan itu wilayah Arktik masih menjadi zona ketegangan rendah alih-alih arena pelaksanaan politik tinggi.<sup>12</sup> Terkelolanya situasi di Arktik tak lepas dari tata kelola Arktik melalui *Arctic Council* sebagai forum pemerintahan yang berfungsi untuk mempromosikan perdamaian di antara negara Arktik, kemakmuran penduduk asli Arktik, dan Arktik sebagai tempat kolaborasi dan stabil.<sup>13</sup>

Dalam kasus keterlibatan negara non-Arktik di Arktik, kawasan yang identik dengan politik *exceptionalism* sejak pasca era Perang Dingin saat ini sebagian diartikulasikan sebagai *global commons*.<sup>14</sup> Dalam konteks Arktik, pandangan

---

<sup>10</sup> Alken, K., Smieszek M., Riedel A., Rachold V., & Grosfeld L. (2020, Mei). *Arctic Governance: Current Knowledge on the Theme*. Diambil kembali dari ecologic.eu: <https://www.ecologic.eu/17446>

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Klimenko, E. (2019, Desember). *The Geopolitics of a Changing Arctic*. Diambil kembali dari sipri.org: [https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-12/sipribp1912\\_geopolitics\\_in\\_the\\_arctic.pdf](https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-12/sipribp1912_geopolitics_in_the_arctic.pdf)

<sup>13</sup> Alken, K., Smieszek M., Riedel A., Rachold V., & Grosfeld L. (2020, Mei). *Arctic Governance: Current Knowledge on the Theme*. Diambil kembali dari ecologic.eu: <https://www.ecologic.eu/17446>

<sup>14</sup> Istilah *global commons* sementara hanya digunakan untuk merujuk pada suatu tempat atau wilayah yang menarik perhatian internasional dalam konteks perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan perjanjian internasional (lihat pada Ikeshima, T. (2015). Should Japan's Arctic Policy be Based on the Assumption That the Arctic Ocean is a Global Common? *Waseda Global Forum*, 109-150.). Nico Schrijver menerjemahkan istilah *global commons* sebagai istilah yang merujuk pada wilayah dan

*Arctic global commons* digunakan untuk menggarisbawahi bahwa sumber daya Arktik seperti perikanan sebagai *common goods*.<sup>15</sup> Negara non-Arktik seperti China membangun gagasan Arktiknya sebagai *global commons*,<sup>16</sup> meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kebijakan Arktiknya. Hal ini karena adanya perbedaan dalam melihat batas-batas Arktik. China dalam hal ini menggarisbawahi bahwa “Area tertentu di Samudera Arktik merupakan bagian dari laut lepas dan Kawasan tersebut, “Kawasan” tersebut adalah Samudera Arktik Tengah.<sup>17</sup> Dengan kata lain, China mendorong anggapan bahwa perairan Arktik dan Samudera Arktik Tengah sebagai bagian dari *global commons*, terbuka untuk navigasi internasional karena merupakan perairan internasional. Sementara negara-negara Arktik, terutama lima negara pesisir Samudera Arktik memahami bahwa Samudera Arktik Tengah adalah laut lepas dan hanya laut lepas saja yang layak memenuhi syarat *global commons*, yaitu Samudera Arktik tengah.<sup>18</sup>

---

sumber daya di luar kedaulatan negara manapun tetapi berbagi kepemilikannya dengan negara lain. Istilah ini dibangun dari ide *mare liberum* milik Grotius, yakni sebuah ide tentang melestarikan kebebasan akses demi keuntungan bersama (lihat pada Schrijver, N. (2016). *Managing the global common: common good or common sink? Third World Quarterly*, 1252-1267)

<sup>15</sup> Burke, D. C. (2018, April 8). *Why the Arctic isn't a 'global commons'*. Diambil kembali dari <https://theconversation.com/amp/why-the-arctic-isnt-a-global-commons-93976>

<sup>16</sup> Buchanan, E. (2021, September 8). *China's Hybrid Arctic Strategy*. Diambil kembali dari Concordiam: <https://perconcordiam.com/chinas-hybrid-arctic-strategy/>

<sup>17</sup> Bennett, M. (2018, Januari 26). *It's official: China releases its first Arctic Policy*. Diambil kembali dari Cryopolitics: <https://www.cyopolitics.com/2018/01/26/official-china-releases-first-arctic-policy/>

<sup>18</sup> Burke, D. C. (2018, April 8). *Why the Arctic isn't a 'global commons'*. Diambil kembali dari <https://theconversation.com/amp/why-the-arctic-isnt-a-global-commons-93976>

Upaya menjadikan Arktik sebagai *global commons* melalui ambisi China dalam membangun *Polar Silk Road* di samping pengakuannya sebagai *near-Arctic state* membingkai China sebagai aktor global yang bertanggung jawab untuk memelihara wilayah Arktik dan menyediakan akses terhadap sumber daya milik bersama dilihat sebagai ancaman bagi negara-negara Arktik dan memungkinkan China beroperasi di wilayah itu di bawah tantangan strategis yang nyata.<sup>19</sup> Fakta ini yang kemudian membuat peneliti kebanyakan lebih tertarik untuk menyoroti keterlibatan China di wilayah Arktik dibandingkan dengan negara Asia Timur lainnya, yakni Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara Asia Timur tersebut tidak terlalu mengandalkan gagasan *global commons* untuk bisa bermain di Arktik. Meski kedua negara memiliki minat yang besar pada peluang yang dimungkinkan oleh wilayah Arktik yang berubah.

Korea Selatan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung-bak (Februari 2008- Februari 2013) memulai untuk aktif dalam tata kelola Arktik dengan melibatkan *Arctic Council* dan negara-negara Arktik,<sup>20</sup> setelah menjadi anggota penuh IASC (*International Arctic Science Committee*) pada tahun 2002 dan pada tahun yang sama membuka stasiun penelitian pertamanya di Svalbard.<sup>21</sup> Dalam rangka keterlibatan lebih lanjut Korea Selatan di

---

<sup>19</sup> Buchanan, E. (2021, September 8). *China's Hybrid Arctic Strategy*. Diambil kembali dari Concordiam: <https://perconcordiam.com/chinas-hybrid-arctic-strategy/>

<sup>20</sup> Kossa, M. (2018). South Korea and the Arctic Region. In B. O'Donnell, M. Gruenig, & A. Riedel, *Arctic Summer College Yearbook* (pp. 73-92). Springer International Publishing AG.

<sup>21</sup> Tonami, A. (2014, Februari 15). *Arctic newcomers: Japan, South Korea and Singapore*. Retrieved from <https://www.eastasiaforum.org/2014/02/15/arctic-newcomers-japan-south-korea-and-singapore/#more-40319>

wilayah Arktik, Presiden Lee Myung-bak untuk pertama kalinya mengumumkan pendekatan Arktiknya di dalam pidatonya yang berjudul *A Great People with New Dreams* pada acara perayaan *National Liberation Day* pada tahun 2008 ketika menyatakan<sup>22</sup>:

*“Exploration and research in the Arctic Ocean and Antarctica, which are thought to be a treasure trove of natural resources, will be actively conducted. By doing so, we will show the world that a spirit of adventure and creativity in pioneering uncharted territory runs in the Korean blood”.*<sup>23</sup>

Pernyataan tersebut berkaitan dengan paradigma pembangunan nasional tentang *Green Growth* yang mengacu pada *sustainable growth* untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi lingkungan serta pergeseran paradigma energi Korea Selatan untuk mengatasi krisis energi dengan maksud mengandalkan pertumbuhan hijau (*green growth*).<sup>24</sup> Pada tahun yang sama, Korea Selatan mengajukan status pengamat/observer di *Arctic Council*. Pada tahun 2012, Korea Selatan mengumumkan *Arctic Policy Advancement Direction*, merupakan studi tentang kemungkinan rute navigasi alternatif dan studi sosial-ekonomi di wilayah Arktik.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Kossa, M. (2018). South Korea and the Arctic Region. In B. O'Donnell, M. Gruenig, & A. Riedel, *Arctic Summer College Yearbook* (pp. 73-92). Springer International Publishing AG..

<sup>23</sup> Yonhap. (2008, Agustus 15). *Full text of Presidential Lee's address on liberation, founding anniversaries*. Retrieved Mei 10, 2023, from <https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20080815001900315>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *The Geopolitics of the Arctic: Commerce, Governance and Policy*. (2013, September 23). Diambil kembali dari <https://www.idsa.in/event/TheGeopoliticsoftheArctic>

Pada Mei 2013, Korea Selatan diterima menjadi formal observer di *Arctic Council* dan Juli 2013 mengumumkan *Comprehensive Arctic Policy Framework Plan*.<sup>26</sup> Tujuan utamanya adalah untuk membangun kemitraan internasional dalam riset saintifik dan untuk membantu pengembangan bisnis yang berkelanjutan di Kutub Utara.<sup>27</sup> Pada tahun yang sama, dengan *Comprehensive Arctic Policy Framework Plan* sebagai *blueprint*, Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Park Geun-hye merilis kebijakan Arktik final *Korean Arctic Master Plan* pada Desember 2013 untuk periode antara tahun 2013 hingga tahun 2017.<sup>28</sup> Hal ini yang kemudian menjadikan Korea Selatan sebagai negara Asia observer di *Arctic Council* pertama yang menerbitkan dokumen kebijakan terintegrasi terhadap wilayah Arktik.<sup>29</sup> Korea Selatan mengambil peran Arktiknya sebagai *polar leading nation* masa depan dengan kebijakan Arktik resmi yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional, kegiatan penelitian ilmiah, dan bisnis

---

<sup>26</sup> Jin, D., Won-sang Seo, & Lee, S. (2017). Arctic Policy of the Republic of Korea. *Ocean and Coastal Law Journal*. Hal. 89

<sup>27</sup> *The Geopolitics of the Arctic: Commerce, Governance and Policy*. (2013, September 23). Diambil kembali dari <https://www.idsa.in/event/TheGeopoliticsoftheArctic>

<sup>28</sup> Jin, D., Won-sang Seo, & Lee, S. (2017). Arctic Policy of the Republic of Korea. *Ocean and Coastal Law Journal*. Hal. 89

<sup>29</sup> Kossa, M. (2018). South Korea and the Arctic Region. In B. O'Donnell, M. Gruenig, & A. Riedel, *Arctic Summer College Yearbook* (pp. 73-92). Springer International Publishing AG.

Arktik.<sup>30</sup> Ini merupakan langkah besar yang bisa diambil oleh negara yang terkadang didefinisikan sebagai *latecomer* karena kebijakan Arktiknya.<sup>31</sup>

Literatur yang ada saat ini tidak banyak yang membahas Korea Selatan sebagai salah satu negara Asia Timur yang bermain di Arktik dan berdasarkan kajian yang ada lebih banyak berfokus pada menjelaskan kebijakan Arktik Korea Selatan yang didasari oleh motivasi ekonomi sebagai kepentingan kunci dari keterlibatan Korea Selatan di wilayah Arktik. Terlepas dari masih sedikitnya literatur yang membahas tentang keterlibatan Korea Selatan sebagai *middle power* di Arktik, berikut adalah literatur yang sekiranya relevan dengan penelitian ini yang penulis bagi menjadi dua kategori. Pertama, tulisan yang membahas *middle power diplomacy* Korea Selatan di Arktik. Kedua, tulisan yang membahas peran *middle power* Korea Selatan di Arktik.

Tulisan kategori pertama adalah dari Jay-Kwon James Park,<sup>32</sup> dan Eunji Kim dan Anna Stenport<sup>33</sup>. Berdasarkan tulisan Park, kepentingan Korea Selatan di Arktik tak hanya datang dari dimensi ekonomi dan keamanan energi tetapi juga berasal dari keinginan Korea Selatan untuk menggunakan Arktik sebagai platform

---

<sup>30</sup> Tonami, A. (2016). Arctic Policy of South Korea. Dalam A. Tonami, *Asian Foreign Policy in a Changing Arctic* (hal. 73-92). London: Palgrave Macmillan.

<sup>31</sup> Tonami, A. (2016). Insight From the Theoretical Framework. Dalam A. Tonami, *Asian Foreign Policy in a Changing Arctic* (hal. 122-124). London: Palgrave Macmillan.

<sup>32</sup> Park, J.-K. J. (2017). *Projecting South Korea's Future as a Middle Power in the Arctic*. Diambil kembali dari [digital.lib.washington.edu: https://digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/40811](https://digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/40811)

<sup>33</sup> Kim, E., & Stenport, A. (2021). South Korea's Arctic Policy: political motivations for 21st century global engagement. *The Polar Journal*, 11-29.

untuk meningkatkan profil internasionalnya sebagai *middle power*. Tulisan tersebut menggunakan *middle power diplomacy* dan *soft power* untuk menganalisa potensi keuntungan Korea Selatan dari kehadirannya sebagai *middle power* di Arktik. Selaras dengan Park, sebagai kebaruan dari kajian tentang kebijakan Arktik Korea Selatan yang sudah ada Eunji Kim dan Anna Stenport dalam tulisannya menguraikan tentang motivasi politik kepentingan Arktik Korea Selatan dengan melihat kebijakan Arktik Korea Selatan dalam kerangka *middle power diplomacy* dan menggunakan globalisasi dan *soft power* sebagai instrumen.

Tulisan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Arktik Korea Selatan dirilis berdasarkan dari akumulasi pembabakan 20 tahun *middle power diplomacy* Korea Selatan yang dilakukan secara global dari era masa pemerintahan Kim Dae-jung hingga Moon Jae-in. Eunji Kim dan Anna Stenport berpendapat bahwa kebijakan Arktik Korea Selatan merupakan alat untuk meningkatkan pengaruh Korea Selatan sebagai *middle power*. Selain itu, tulisan tersebut juga menyebutkan bahwa kebijakan globalisasi *segyehwa* sebagai retorika utama kebijakan luar negeri Korea Selatan mendukung peluasan kepentingan Korea Selatan di ranah internasional dan *soft power* sebagai instrumen *middle power diplomacy* mengacu pada kemampuan Korea Selatan di bidang sains dan teknologi berkontribusi dalam mengekspresikan kepentingan Korea Selatan dalam isu perubahan iklim, pembangunan hijau, dan kepedulian terhadap orang Arktik asli.

Kemudian, tulisan kategori kedua dari Ian Watson,<sup>34</sup> membahas tentang potensi pergeseran peran Korea Selatan sebagai *middle power* menjadi *pivot power* dalam partisipasinya sebagai *Arctic observer* di *Arctic Council*. Tulisan tersebut menyoroti strategi Arktik Korea Selatan pada era pemerintahan Presiden Lee Myung-bak dan Park Geun-hye yang berkaitan dengan strategi transkontinental yang lebih luas dan secara spesifik merujuk pada kebijakan *Global Korea* dan *Eurasia Initiative*. Ekspektasi peran *middle power* dalam sistem internasional dan pendekatan *network theory* dan *positioning* diaplikasikan untuk menjelaskan peran Korea Selatan di Arktik. Hasilnya menunjukkan bahwa peran Korea Selatan di Arktik berpotensi bergeser dari *brigde nation* ke *pivot nation* terkait dengan implementasi kebijakan *Eurasia Initiative* sebagai kebijakan yang merefleksikan ambisi geoekonomi Korea Selatan di Eurasia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti Korea Selatan sebagai *middle power* dalam keterlibatannya di Arktik dan menjadikan kebijakan Arktik Korea Selatan sebagai komponen penting dalam analisa keterlibatan Korea Selatan di Arktik. Kebaruan dalam penelitian ini berfokus pada analisis strategi Korea Selatan sebagai *middle power* untuk menumbuhkan kehadirannya di Arktik yang kurang dijelaskan dalam literatur yang sudah ada. Menurut penulis hal ini penting untuk dikaji untuk menambah literatur dalam mengeksplor aktivitas Korea Selatan di Arktik. Untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam literatur sebelumnya penulis menggunakan strategi *middle power*

---

<sup>34</sup> Watson, I. (2016). From Middle Power to Pivot Power: Korea as an Arctic Observer in the Age of Eurasia. *Pacific Focus*, 333-356.

sebagai kerangka teoritis dalam mengidentifikasi strategi Korea Selatan untuk menumbuhkan kehadirannya di Arktik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang terpapar di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana strategi Korea Selatan sebagai *middle power* untuk menumbuhkan kehadirannya di Arktik?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir skripsi dan seminar Hubungan Internasional dalam program studi Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan strategi Korea Selatan sebagai *middle power* untuk menumbuhkan kehadirannya di Arktik.

## **1.4 Landasan Teoritis**

### 1.4.1. Strategi *Middle Power*

Pertama, perlu diperhatikan bahwa tidak ada satu definisi yang disepakati untuk istilah *middle power* dalam hubungan internasional.<sup>35</sup> Namun, literatur saat ini menawarkan dua definisi utama yang berkebalikan, yakni *middle power* dipahami dalam istilah kategorial aktor yang didefinisikan oleh posisi relatif atau perilakunya dalam sistem internasional.<sup>36</sup> Definisi *middle power* yang pertama menurut pendekatan posisional menyatakan bahwa posisi negara dalam sistem internasional adalah fundamental, apabila tidak fundamental maka ditentukan oleh perilakunya.<sup>37</sup> Pendekatan posisional melihat *middle power* dengan merujuk pada fitur konstitutif atau kemampuan yang menentukan posisi negara berada di antara *great power* dan *minor power* dalam hierarki internasional.

Posisi di tengah dalam sistem memungkinkan *middle power* memiliki tingkat kapasitas kebijakan ‘Goldilocks’ lebih banyak daripada kekuatan yang lebih kecil tetapi masih di bawah *great power*.<sup>38</sup> Adapun yang membedakan antara *middle power* dan *minor power* berdasarkan Randall Schweller yaitu selain terletak pada perbedaan kemampuan kekuatan material dan kemampuan memproyeksikan kekuatan adalah dalam menjalankan fungsi dasar negara.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> John, J. V. (2014). Becoming and Being a Middle Power: Exploring a New Dimension of South Korea’s Foreign Policy. *China Report*. Hal. 327

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal. 328.

<sup>38</sup> Robertson, J. (2022). Middle Power Diplomacy and North Korea Revisited. *International Journal of Korean Unification Studies*. Hal. 170

<sup>39</sup> Schweller, R. (n.d.). The Concept of Middle Power. *CSIS Korea Chair*. Hal. 2-3

Saat ini, meski pendekatan posisional didominasi oleh kemampuan nyata (*tangible capabilities*) peneliti *middle power* seperti Matthew Stephen berpendapat bahwa kemampuan dalam pendekatan ini tidak secara eksklusif hanya berdasarkan sumber daya material atau kemampuan fisik relatif negara, tetapi dapat juga termasuk kemampuan yang kurang nyata (*less tangible capabilities*) seperti struktur negara yang kuat, kohesi internal, keterampilan diplomatik, dan kepemimpinan.<sup>40</sup>

Selain itu, Sook-Jong Lee, Chaesung Chun, Hyejung Suh, dan Patrick Thomsen juga berpendapat bahwa *middle power* tidak dinilai dari segi kekuatan mentah, tetapi dimana letak posisi negara dalam jaringan.<sup>41</sup> Hal ini karena kecenderungan global untuk menuju saling ketergantungan yang lebih besar terutama dalam dunia sistem ekonomi internasional menciptakan struktur jaringan yang menjadikan tingkat keterhubungan antar negara yang berbeda dapat mencerminkan kekuatan *middle power* berasal.<sup>42</sup> Atas dasar ini, kekuatan negara tidak lagi semata-mata hanya berasal dari kemampuan material tetapi dari kekuatan posisinya dalam jaringan.<sup>43</sup> Kahler menyebut bahwa kekuatan *middle power* yang berasal dari posisi dalam jaringan dengan istilah *network*

---

<sup>40</sup> Stephen, M. (2013). The Concept and Role of Middle Powers during Global Rebalancing. *Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations*. Hal. 38

<sup>41</sup> Lee, S.-J., Chaesung Chun, Hyeung Suh, & Thomsen, P. (2015). Middle Power in Action: The Evolving Nature of Diplomacy in the Age of Multilateralism. *The East Asian Institute*. Hal. 3-4

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

*power*.<sup>44</sup> *Network power* menjadi sumber penting dari *middle power* yang diperoleh melalui mencari ikatan multilateral di bidang ekonomi, lingkungan, dan keragaman keamanan nontradisional.<sup>45</sup>

Definisi *middle power* kedua menurut pendekatan perilaku yang berpendapat bahwa *middle power* didefinisikan dalam istilah perilaku kebijakan luar negeri. Dalam pendekatan perilaku *middle power* ditentukan oleh perilaku negara dan perilaku negara tidak ditentukan oleh ciri-ciri konstitutifnya (kemampuan relatif) atau posisinya dalam sistem internasional, meski ciri-ciri itu memang memengaruhi kerangka kebijakan luar negeri *middle power*.<sup>46</sup> Dengan kata lain, *middle power* menurut pendekatan ini adalah negara yang bertindak atau mencoba bertindak untuk menjadi yang dapat dipercaya (*trustworthy*) dengan bantuan *soft power* dan kemampuan diplomasi. Penelitian Andrew F. Cooper, Richard Higgott, dan Richard Nossal berkontribusi dalam mendefinisikan *middle power* berdasarkan pendekatan perilaku dengan menggambarkan konsep *middle power* melalui pola perilaku hubungan diplomatik yang melibatkan *middlepowermanship*.<sup>47</sup> *Middlepowermanship*

---

<sup>44</sup> Kahler, M. (2017). Chapter Two: Middle Power, Network Power, and Soft Power. Dalam V. D. Cha, & M. Dumond, *The Korean Pivot* (hal. 10-15). Washington, DC: Center for Strategic and International Studies.

<sup>45</sup> Lee, S. J. (2016). South Korea Aiming to Be an Innovative Middle Power. Dalam S. J. Lee, *Transforming Global Governance with Middle Power Diplomacy* (hal. 1-13). New York: Palgrave Macmillan.

<sup>46</sup> John, J. V. (2014). Becoming and Being a Middle Power: Exploring a New Dimension of South Korea's Foreign Policy. *China Report*. Hal. 328

<sup>47</sup> Cooper, A. F., Richard A. Higgott, & Kim Richard Nossal. (1993). *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order*. Vancouver: University of British Columbia Press.

didefinisikan sebagai kecenderungan perilaku kebijakan luar negeri yang menunjukkan preferensi pada multipolaritas, tatanan berbasis aturan, institusi, dan warga internasional yang baik.<sup>48</sup> Selain itu, *middle power* juga diartikan sebagai negara yang memiliki kepentingan untuk memelihara *status quo* dan berusaha mempertahankannya melalui kompromi, kerja sama, dan koordinasi.<sup>49</sup>

Perilaku *middle power* menurut van den Berg diartikan sebagai alat atau strategi praktis untuk mencapai tujuan dan kepentingan.<sup>50</sup> Dalam kasus *middle power* alat terbaik adalah diplomasi.<sup>51</sup> Selaras dengan hal ini, Shin-wha Lee dan Chun Young Park dalam tulisannya menyatakan bahwa ‘diplomasi *middle power* telah menjadi strategi yang berguna dan praktis bagi negara-negara yang kurang *powerful* dalam hubungan internasional abad ke-21’.<sup>52</sup> Meski kurangnya kejelasan definisi yang tepat tentang diplomasi *middle power*,<sup>53</sup> diplomasi *middle power* dapat dipahami bahwa *middle power* atau kekuatan menengah secara umum tidak diharapkan untuk terlibat dalam diplomasi agresif,

---

<sup>48</sup> O’Neil, A. (2015). South Korea as a Middle Power: Global Ambitions and Looming Challenges. *Council on Foreign Relations*. Hal. 77

<sup>49</sup> Cooper, A. F., Richard A. Higgott, & Kim Richard Nossal. (1993). *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order*. Vancouver: University of British Columbia Press. Hal. 19

<sup>50</sup> van den Berg, C. (2016). *The middle power dream: south korea’s journey through political opportunity structure, middle power capacity, middle power diplomacy, and middlepowermanship*. Diambil kembali dari studenttheses.universiteitleiden.nl: <https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A2605244/view>.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Lee, S.-w., & Park, C. Y. (2017). Korea’s Middle Power Diplomacy for Human Security: A Global and Regional Approach. *JOURNAL OF INTERNATIONAL AND AREA STUDIES*. Hal. 21

<sup>53</sup> Lee, S.-J. (2012). South Korea as New Middle Power Seeking Complex Diplomacy. *EAI Asia Security Initiative Working Paper*. Hal. 15

melainkan lebih memilih keterlibatan konstruktif dan *consensus-building* dalam mengejar perdamaian dan manajemen konflik, multipolaritas, dan *rules-building*.<sup>54</sup> Jeffrey Robertson berpendapat bahwa sebagai pengakuan, semua diplomasi termasuk diplomasi multilateral pada akhirnya dikejar secara bilateral, *middle power* harus mempertahankan kapasitas yang memadai untuk mendapat dukungan dari mitra bilateral dengan memanfaatkan inisiatif diplomatik dan kebijakan luar negeri.<sup>55</sup>

Dalam konteks diplomasi *middle power*, inisiatif diplomatik dan kebijakan luar negeri *middle power* terdiri atas lima elemen: spesialisasi, kreativitas, internasionalisasi, bermitra, dan diplomasi publik.<sup>56</sup> Perilaku *middle power* yang digunakan dalam tulisan ini bergantung pada definisi van den Berg, yaitu diplomasi. Karena itu, untuk menjelaskan strategi Korea Selatan di wilayah Arktik penulis menggunakan lima elemen dalam inisiatif diplomatik dan kebijakan luar negeri *middle power* yang telah disebutkan di atas.

a. Spesialisasi. Ini seringkali dikaitkan dengan *middle power* dalam membangun reputasi diplomatiknya melalui dedikasi dan konsisten memfokuskan sumber dayanya pada satu bidang tertentu yang diakui dan dilihat secara positif oleh komunitas internasional.<sup>57</sup> Spesialisasi diidentifikasi sebagai yang cenderung berfokus pada kebijakan luar negeri

---

<sup>54</sup> Robertson, J. (2022). Middle Power Diplomacy and North Korea Revisited. *International Journal of Korean Unification Studies*. Hal. 170-171

<sup>55</sup> *Ibid.* Hal. 170

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal. 170-171.

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal. 170

bidang non-tradisional.<sup>58</sup> Khususnya, mencoba berkontribusi pada isu global seperti perubahan iklim, *peacebuilding*, bantuan pembangunan internasional, dan perlindungan pengungsi. Heather A. Smith dalam hal ini menggunakan istilah *minimize risk* dan *maximize benefits* untuk mengekspresikan kecenderungan negara yang berfokus pada satu bidang atau masalah tertentu untuk menghasilkan hasil terbaik.<sup>59</sup> Atas dasar ini, dengan menyalurkan sumber daya dan keahlian di bidang tertentu dalam penggunaan yang bijaksana negara dapat mencapai tujuannya melalui biaya yang minimum.

- b. Kreativitas. Jeffrey Robertson menerjemahkan kreativitas dalam artian bahwa *middle power* mengembangkan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah yang sulit untuk diselesaikan baik di dalam maupun di luar sistem diplomatik,<sup>60</sup> meningkatkan relevansi negara dengan negara lain dan melayani kepentingan kedua pihak.<sup>61</sup>
- c. Internasionalisasi. Internasionalisasi adalah menempatkan isu menjadi urusan regional atau internasional.<sup>62</sup> Hal ini mencerminkan kecenderungan

---

<sup>58</sup> Smith, H. A. (2001). Niche Diplomacy in Canadian Human Right Policy: Ethics or Economics? Dalam Rosalind Wind, *Ethics and Security in Canadian Foreign Policy*. Vancouver: UBC Press. Hal. 79

<sup>59</sup> Ibid. Hal. 79-81

<sup>60</sup> Robertson, J. (2022). Middle Power Diplomacy and North Korea Revisited. *International Journal of Korean Unification Studies*. Hal. 170-171

<sup>61</sup> Gürol, B., & Kaya, T. Ö. (2014). Testing the creativity of Kevin Rudd's middle power diplomacy: EU-Australia partnership framework versus Asia-Pacific community. *International Relations of the Asia Pacific*.

<sup>62</sup> Robertson, J. (2022). Middle Power Diplomacy and North Korea Revisited. *International Journal of Korean Unification Studies*. Hal. 171.

*middle power* terhadap diplomasi multilateral dan regional daripada hanya mengandalkan proyeksi kekuatan nasional sendiri agar dapat didengar dan dihormati.<sup>63</sup> Dalam konteks ini, *middle power* dapat memberikan kontribusi intelektualnya dengan bertindak sebagai penghasil/ pengusul ide.<sup>64</sup> Selain itu, internasionalisasi juga dapat menjadi pendekatan bagi pemain ekstra-regional yang berusaha terlibat ke dalam regional atau kawasan tertentu dan berfokus pada inklusivitas.<sup>65</sup>

- d. Bermitra. *Middle power* dalam aktivitas internasionalnya membangun kemitraan baik dengan negara, badan multilateral atau IGO, dan aktor non-negara untuk meningkatkan *leverage* negosiasi.<sup>66</sup> Cochrane mendefinisikan istilah kemitraan sebagai hubungan kolaboratif antara dua pihak atau lebih yang telah sepakat untuk bekerja sama yang didasarkan pada kepercayaan, kesetaraan dan saling pengertian, dan berfokus pada mengejar tujuan bersama yang tidak dapat dicapai sendiri.<sup>67</sup> Bermitra merupakan langkah

---

<sup>63</sup> Muhui, Z. (2016). Growing Activism as Cooperation Facilitator: China-Japan-Korea Trilateralism and Korea's Middle Power Diplomacy. *The Korean Journal of International Studies*. Hal. 313

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal. 314

<sup>65</sup> Poonkham, J. (2022). Power Politics and the Institutional Architecture in the Mekong Subregion: Beyond the Geopolitical Trap? *International Studies Center*. Hal. 5

<sup>66</sup> Robertson, J. (2022). Middle Power Diplomacy and North Korea Revisited. *International Journal of Korean Unification Studies*. Hal. 171

<sup>67</sup> Cochrane. (2018., September 11). *Successfully engaging external partners – new guidance now available*. Diambil kembali dari <https://community.cochrane.org/news/successfully-engaging-external-partners-new-guidance-now-available>

penting dalam menumbuhkan kehadiran di kawasan yang menawarkan peluang.<sup>68</sup>

- e. Diplomasi publik. *Middle power* menggunakan diplomasi publik untuk membangun dukungan untuk langkah-langkahnya dan dalam hal memperkuat posisinya sebagai pihak yang kredibel, handal, dan independen dengan mengandalkan opini publik internasional dan negara mitra.<sup>69</sup>

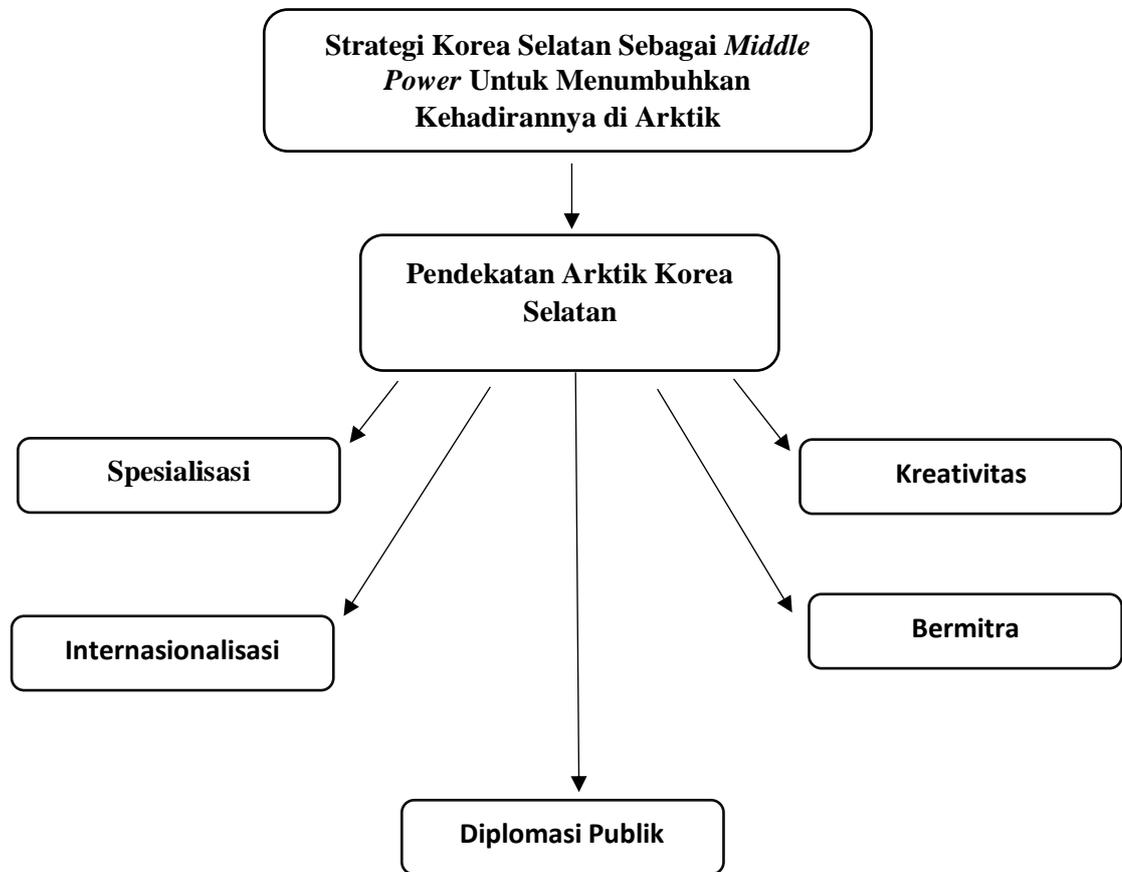
### **1.5 Sintesa Pemikiran**

---

<sup>68</sup> Canada.ca. (2012, Oktober 9). *Canada Formally Joins Trans-Pacific Partnership*. Diambil kembali dari <https://www.canada.ca/en/news/archieve/2012/10/canada-formally-joins-trans-pacific-partnership.html>

<sup>69</sup> Robertson, J. (2022). Middle Power Diplomacy and North Korea Revisited. *International Journal of Korean Unification Studies*. Hal. 171

Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Digambar oleh penulis

Pendekatan Arktik Korea Selatan adalah kebijakan Arktik Korea Selatan yang mencakup strategi Arktik Korea Selatan untuk memajukan keterlibatan Arktik Korea Selatan. Bagan di atas menunjukkan bahwa pendekatan Arktik Korea Selatan memuat strategi *middle power* Korea Selatan untuk menumbuhkan kehadirannya di Arktik melalui spesialisasi, kreativitas, internasionalisasi, bermitra, dan diplomasi publik.

## 1.6 Argumen Utama

Tulisan ini berpendapat bahwa Korea Selatan sebagai *middle power* yang bertindak sebagai *trustworthy* di Arktik menerapkan lima strategi *middle power* untuk menumbuhkan kehadirannya di wilayah Arktik yang diuraikan dengan garis besar sebagai berikut: 1) Spesialisasi, mengacu pada pendekatan saintifik Korea Selatan Arktik melalui penelitian ilmiah kutub di sirkumpolar Utara; 2) Kreativitas, mengacu pada pendekatan inovatif Korea Selatan melalui teknologi negara di bidang perkapalan; 3) Internasionalisasi, mengacu pada mendirikan forum terpisah dari *Arctic Council* melalui *Trilateral High Level Dialogue on the Arctic* di Asia Timur; 4) Bermitra, mengacu pada Korea Selatan menjadi mitra Arktik dengan menjalin kerja sama dengan negara Arktik; 5) Diplomasi publik, mengacu pada *Pole-to-Pole Korea*, pameran Arktik, dan *Korea Arctic Academy* untuk meningkatkan hubungan Arktik dan Korea Selatan.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang empiris maka tipe penelitian deskriptif kualitatif dipilih dalam tulisan ini. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dalam pelaksanaannya adalah gabungan dari penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara akurat dan apa adanya mengenai suatu populasi, kondisi, atau fenomena tertentu.<sup>70</sup> Penelitian tipe ini difokuskan

---

<sup>70</sup> *What is Descriptive Research and How it's Done Effortlessly*. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://descriptiveresearch.com/>

untuk menjawab pertanyaan seperti apa, dimana, kapan, dan bagaimana daripada menjawab pertanyaan mengapa.<sup>71</sup>

Sementara penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan memahami fenomena dengan menekankan pada analisa secara mendalam terhadap data non-numerik.<sup>72</sup> Selain itu, pada penelitian kualitatif penelitian dimulai dengan pemaparan data dan menggunakan teori atau konsep yang sudah ada sebagai landasan untuk menjelaskan dan kesimpulan diungkapkan dengan teori atau konsep yang digunakan.<sup>73</sup> Atas dasar ini, dapat disimpulkan bahwa tipe penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan variabel yang diselidiki dengan apa adanya melalui analisa yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh secara kualitatif. Penelitian ini ditulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena penulis hendak berfokus pada upaya mengungkapkan dan mendeskripsikan strategi yang digunakan Korea Selatan untuk menumbuhkan kehadirannya di kawasan Arktik melalui status Korea Selatan sebagai *middle power*.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

---

<sup>71</sup> McCombes, S. (2019, Mei 15). *Descriptive Research | Definition, Types, Methods & Examples*. Diambil kembali dari <https://www.scribbr.com/methodology/descriptive-research/>

<sup>72</sup> Bhandari, P. (2020, Juni 19). *What Is Qualitative Research? | Methods & Examples*. Diambil kembali dari <https://www.scribbr.com/methodology/qualitative-research/>

<sup>73</sup> tripven.com. (2020, Februari 8). *Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Diambil kembali dari <https://www.tripven.com/penelitian-deskriptif-kualitatif/>

Jangkauan penelitian berguna untuk memberikan batasan-batasan pada masalah yang diteliti supaya memudahkan penulis untuk menjelaskannya dengan baik. Jangkauan penelitian meliputi rentang waktu penelitian, ruang lingkup penelitian, dan fokus pembahasan penelitian. Penelitian ini berdasarkan topik yang diangkat mengambil rentang waktu penelitian pada tahun 2008-2017. Sementara ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan mengacu pada variabel yang diteliti dan fokus pembahasan yang searah dengan rumusan masalah.

Ketersediaan data yang bisa diambil dan minat Korea Selatan di wilayah Arktik yang mengalami peningkatan dalam kerangka waktu 2008-2017 menjadi dasar bagi penulis dalam menentukan rentang waktu penelitian. Sejak pada tahun 2008 aktivitas *polar* Korea Selatan di Kutub Utara tampak meluas dan hingga pada tahun 2017 Arktik masih terlihat menjadi tempat untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Dengan pemilihan rentang waktu penelitian pada tahun 2008-2017, maka data-data yang digunakan selama penelitian adalah data-data yang ada di dua era pemerintahan presiden Korea Selatan, yaitu Presiden Lee Myung-bak dan Presiden Park Geun-hye.

Di arena kebijakan baik pada masa Presiden Lee Myung-bak dan Presiden Park Geun-hye Arktik merupakan agenda presidensial Korea Selatan yang sejalan.<sup>74</sup> Pada masa Presiden Lee Myung-bak, Korea Selatan mengidentifikasi Arktik sebagai prioritas Korea Selatan sebelum *Arctic Council* menyambut Korea

---

<sup>74</sup> Kossa, M. (2018). South Korea and the Arctic Region. In B. O'Donnell, M. Gruenig, & A. Riedel, *Arctic Summer College Yearbook*. Springer International Publishing AG. Hal. 75.

Selatan sebagai salah satu dari permanen *observer* baru di *Arctic Council*.<sup>75</sup> Sikap yang sama terhadap Arktik juga ditunjukkan oleh pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Park Geun-hye dengan mengidentifikasi Arktik sebagai salah satu isu paling penting dalam kepresidenannya.<sup>76</sup> Ditambah, kebijakan Arktik resmi Korea Selatan merupakan kelanjutan dari *Measures for the Advancement of the Polar Region* yang menekankan pembuatan kebijakan Arktik komprehensif di tingkat pemerintah.<sup>77</sup>

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif selama proses penelitian. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan penelitian jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data yang dikategorikan sebagai data kualitatif adalah data yang disajikan secara tekstual maupun non-tekstual dan bukan berupa angka atau non-numerik.<sup>78</sup> Data kualitatif di dalam sebuah penelitian diperoleh dengan melakukan pengumpulan data kualitatif. Lamont menjelaskan bahwa dalam riset HI pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa

---

<sup>75</sup> Tonami, A. (2014, Februari 15). *Arctic newcomers: Japan, South Korea and Singapore*. Retrieved from <https://www.eastasiaforum.org/2014/02/15/arctic-newcomers-japan-south-korea-and-singapore/#more-40319>

<sup>76</sup> Woon, C. Y., & Dodds, K. (2020). *Observing' the Arctic: Asia in the Arctic Council and Beyond*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Hal.164

<sup>77</sup> Jin, D., Won-sang Seo, & Lee, S. (2017). Arctic Policy of the Republic of Korea. *Ocean and Coastal Law Journal*, 85-96.

<sup>78</sup> Lamont, C. (2015). Qualitative Methods in International Relations. Dalam C. Lamont, *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications Ltd. Hal. 79

metode seperti wawancara, studi dokumen dan arsip, laporan media, dan penelitian berbasis internet.<sup>79</sup>

Metode pengumpulan yang umumnya sering digunakan dalam sebuah penelitian HI adalah studi dokumen dan arsip. Studi dokumen dan arsip merupakan kegiatan yang diterapkan untuk mengumpulkan data berupa dokumen atau arsip yang bertujuan untuk ‘penyelidikan dokumen dan bahan tekstual lainnya yang dihasilkan oleh dan tentang organisasi’.<sup>80</sup> Kajian di bidang HI yang biasanya menggunakan metode ini adalah kajian yang mengangkat topik penelitian yang mengharuskan peneliti pada tingkat tertentu untuk terlibat dengan dokumen seperti pada kajian organisasi internasional, konflik internasional, politik lingkungan, dan (HAM).<sup>81</sup> Dokumen dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu dokumen berbasis sumber primer dan dokumen berbasis sumber sekunder.<sup>82</sup>

Data yang didapat dari dokumen sumber primer merupakan data yang berasal dari ‘dokumen original yang ditulis oleh individu yang memiliki akses langsung ke informasi yang digambarkan atau dialami langsung dalam sebuah peristiwa tertentu’.<sup>83</sup> Sementara data yang dihasilkan dari dokumen sumber sekunder adalah data yang berasal dari dokumen atau tulisan yang ‘merujuk dan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Ventresca, M. J., & Mohr, J. W. (2017). Chapter 35: Archival Research Methods. Dalam J. A. Baum, & T. J. Rowley, *The Blackwell Companion to Organizations* (hal. 805-828). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

<sup>81</sup> Lamont, C. (2015). Qualitative Methods in International Relations. Dalam C. Lamont, *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications Ltd. Hal. 80

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

menganalisis dokumen sumber primer'.<sup>84</sup> Adapun selain menggunakan studi dokumen dan arsip untuk mengumpulkan data dari sumber primer maupun dari sumber sekunder, hasil laporan media massa dapat pula menjadi sumber penelitian yang berharga.<sup>85</sup> Terakhir, adalah penggunaan internet untuk mengumpulkan informasi tentang topik penelitian menjadikan penelitian berbasis internet sering digunakan peneliti dalam usaha pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan penelitian berbasis internet sebagai strategi mengumpulkan data karena ketersediaan akses ke informasi tentang keterlibatan Korea Selatan di Arktik yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah penelitian. Melalui internet penulis dapat mengakses bahan ilmiah seperti jurnal ilmiah, tesis, dan buku untuk dijadikan sebagai referensi. Selain itu, penulis juga menggunakan *website thin tank* dan situs berita *online* dari media internasional maupun media lokal Korea Selatan. Sementara untuk mengumpulkan informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan dan *Arctic Council*, penulis menggunakan laman resmi kementerian luar negeri Korea Selatan dan institusi yang relevan, serta laman resmi *Arctic Council* dan institusi yang relevan yang menyediakan akses langsung ke pernyataan resmi maupun dokumen yang dibutuhkan selama penelitian.

#### **1.7.4 Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses yang ditempuh peneliti setelah melakukan pengumpulan data. Pada proses ini dibutuhkan teknik analisis data, yaitu cara untuk

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

mengolah data dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari apa yang penting dan dipelajari sebelum diceritakan ke orang lain.<sup>86</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan model analisis data Miles & Huberman yang direvisi dalam buku *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Model analisis data Miles & Huberman terdiri dari tiga arus kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan, yakni kondensasi data/ memadatkan data, *display* data/ penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.<sup>87</sup>

### 1.7.5 Sistematika Penulisan

Struktur kepenulisan penelitian ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, pemaparan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teoritis, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Bab ini merupakan bab dengan judul “Strategi Korea Selatan sebagai *middle power* melalui spesialisasi, kreativitas, dan internasionalisasi”. Didalamnya berisi tiga subbab antara lain **2.1** Spesialisasi: memuat tentang fokus Korea Selatan pada penelitian ilmiah di Arktik; **2.2** Kreativitas: Korea Selatan memiliki kemampuan untuk membantu menyediakan teknologi untuk lingkungan Arktik yang berkelanjutan terutama di bidang teknologi maritim; **2.3**

---

<sup>86</sup> Miles, M. B., A. Michael Huberman, & Jonny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc..

<sup>87</sup> *Ibid.* Hal. 31.

Internasionalisasi: mendirikan *Trilateral High-Level Dialogue on the Arctic* sebagai inisiatif regional negara Asia Timur dalam menginternasionalisasi masalah Arktik.

**BAB III:** Bab ini merupakan bab dengan judul “Strategi Korea Selatan sebagai *middle power* melalui bermitra dan diplomasi publik”. Didalamnya terdiri dari dua subbab yaitu, **3.1** Bermitra: Korea Selatan membangun kemitraan dalam kerangka kerja sama Arktik dengan negara Arktik utama, yaitu negara pesisir Samudra Arktik seperti Rusia, Kanada, Denmark, Norwegia dan dua negara Arktik non-pesisir Samudra Arktik, yaitu Finlandia dan Islandia, dan aktor non-negara di Arktik; **3.2** Diplomasi Publik: *Pole-to-Pole Korea*, pameran Arktik, dan *Korean Arctic Academy* sebagai alat diplomasi publik Korea Selatan untuk mendukung langkah Korea Selatan dalam keterlibatan Arktiknya; **3.3** Analisis Korea Selatan sebagai *middle power* terkait implementasi strategi *middle power*nya di Arktik.

**BAB IV:** Bab ini berisi kesimpulan dan saran.